

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN HAK  
WARIS ATAS TANAH YANG TELAH DIJUAL OLEH  
SALAH SATU AHLI WARIS  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEMALANG)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**GALIH PRIYONO**

**C100100019**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN HAK  
WARIS ATAS TANAH YANG TELAH DIJUAL OLEH  
SALAH SATU AHLI WARIS  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEMALANG)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**GALIH PRIYONO**

**C100100019**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Oleh:

Dosen Pembimbing



**(Nuswardhani, S.H., S.U.)**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ATAS TANAH YANG TELAH DIJUAL OLEH SALAH SATU AHLI WARIS (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEMALANG)**

Yang ditulis oleh:

**GALIH PRIYONO**  
**C100100019**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 13 April 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., S.U.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M. Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M. Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 April 2017

Penulis



Galih Priyono  
C100100019

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEMBAGIAN HAK  
WARIS ATAS TANAH YANG TELAH DIJUAL OLEH  
SALAH SATU AHLI WARIS  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEMALANG)**

**ABSTRAK**

Pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Ketentuan tentang pembagian harta warisan, bahwa cara pembagian harta warisan itu sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan si pewaris sendiri pada saat sebelum meninggal dunia sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara bab ke tigabelas tentang surat wasiat. Pada kenyataannya di masyarakat peristiwa yang terjadi, walaupun dalam pelaksanaan pembagian warisan telah terdapat surat wasiat dari si pewaris terkait pembagian harta warisan ataupun telah dibuat kesepakatan bersama masih saja seringkali timbul sengketa diantara ahli waris terkait dengan pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Dan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. *Kedua*, Penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum. *Ketiga* sebagai akibat hukumnya yaitu Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.

**Kata Kunci:** *perbuatan melawan hukum, sengketa waris, pembagian harta warisan*

**ABSTRACT**

Inheritance arise due to the occurrence of events that happen to a person's death from family members, especially the elderly people that father and mother. If the deceased person's own property, the problem is not an event of death, but the assets left by the deceased. The provisions regarding the division of inheritance, that the division of inheritance is left entirely to the discretion of the testator himself in the moments before death as the provisions in the Civil Code thirteenth chapter of wills. In fact, in the community of what happened, although the implementation of inheritance have been there a will of the testator's estate or related division has created a collective agreement is still commonly arise disputes between heirs associated with the division of the inheritance. This study uses descriptive normative. Using secondary data and primary data. Data collection

techniques using literature studies, field studies and interviews. And using qualitative data analysis methods. Based on the results of research and discussion can be concluded that: *First*, the Court has obtained legal facts and concluded that the proven events occur disputed land purchase made by the Defendants. So that the judges stated that Defendant's actions constitute an unlawful act. *Second*, Control over the disputed land by the second defendant committed an act against the law. *Third* as a legal consequence that The Defendants or anyone who control the land in order to deliver to the plaintiff in an empty state.

**Keyword:** *tort, inheritance disputes, division of property*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yaitu kematian atau meninggal dunia.<sup>1</sup>

Apabila berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apakah yang akan terjadi dengan segala sesuatu harta benda yang ia tinggalkan. Terkait dengan hal tersebut tentunya jalan pikiran kita akan menuju kepada masalah warisan.<sup>2</sup> Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>3</sup>

Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan ini dapat berlangsung sesuai dengan aturan hukum, agama, dan adat. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) unsur pokok untuk dapat terlaksananya suatu pewarisan, yaitu adanya pewaris, ada harta yang ditinggalkan,

---

<sup>1</sup> Angga Wijaya, 2015, *Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Studi Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Hal 3.

<sup>2</sup> Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dan ada ahli waris.<sup>4</sup> Pengertian pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Sedangkan pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.<sup>5</sup>

Pewarisan timbul karena terjadinya peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.<sup>6</sup>

Ketentuan tentang pembagian harta warisan, bahwa cara pembagian harta warisan itu sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan si pewaris sendiri pada saat sebelum meninggal dunia sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdara bab ke tigabelas tentang surat wasiat.

Pada kenyataannya di masyarakat peristiwa yang terjadi, walaupun dalam pelaksanaan pembagian warisan telah terdapat surat wasiat dari si pewaris terkait pembagian harta warisan ataupun telah dibuat kesepakatan bersama masih saja seringkali timbul sengketa diantara ahli waris terkait dengan pembagian harta warisan. Salah satu dari sengketa yang timbul misalnya salah satu ahli waris bermaksud secara melawan hukum untuk menguasai sendiri harta warisan berupa hak atas tanah. Sehingga dengan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya, ia menjual harta warisan yang berupa tanah tersebut kepada orang lain. Padahal ternyata harta warisan tersebut belum dibagi waris dengan para ahli waris yang lainnya.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 9.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 193.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Apabila tanah yang merupakan harta warisan ternyata dijual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris lainnya, sedangkan si pembeli mengetahui bahwa objek jual beli tersebut adalah tanah sengketa maka proses jual beli tersebut adalah cacat hukum.

## **2. METODE**

Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.<sup>7</sup> Tujuannya adalah untuk meneliti kaidah-kaidah hukum yang harus dipenuhi dalam pengajuan alat bukti dan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dalam proses penyelesaian pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris.<sup>8</sup>

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu. Yang dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian mengenai proses penyelesaian pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris.

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal 15.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hakim dalam Menentukan Pembuktian atas Sengketa Pembagian Hak Waris Atas Tanah yang Telah Dijual oleh Salah Satu Ahli Waris**

Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti gugatan Para Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Para Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Pertama*, Benar berdasarkan bukti Surat P-2 dan keterangan saksi-saksi bahwa sebidang tanah obyek sengketa angka 2.1 tersebut persil No. III yang merupakan bagian dar, C.678 luas + 1.048,8 da. (10.488 M2) atau satu hektar lebih terletak di Desa Tlagasanao Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dan sebidang tanah objek sengketa angka 2.2 tersebut dalam persil No. 37 yang merupakan bagian dari C. 576 luas + 885 da. (8850 MZ ) terletak di Blok Sered Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Adalah tanah-tanah milik Para Penggugat asal pemberian dari ayahnya yaitu alm Mulyowidjoyo alias Dera alias H.Abdulrahman.

*Kedua*, benar berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tanah peninggalan dari Pak H. Abdulrahman (objek sengketa) yang merupakan tanah bagiannya Suyanto dan Topo (Para Penggugat) dikuasai oleh pak Suyatno/Yatun (Tergugat I) serta tanah tersebut digarap sampai pak Suyatno meninggal dunia dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh istrinya pak Suyatno (Yatun/Tergugat I);

*Ketiga*, benar berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi bahwa jual beli tanah obyek sengketa 2.1 yang dilakukan oleh alm. Suyatno dan Yatun (Tergugat I) sebagai penjual dan Supadi (Tergugat II) sebagai pembeli adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat.

*Keempat*, berdasarkan bukti tertulis maupun bukti saksi, Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa obyek-obyek tanah sengketa yang Para Penggugat maksud adalah milik dari suaminya yang bernama SUYATNO dan Tergugat I

tidak dapat membuktikan bahwa obyek-obyek tanah sengketa tersebut Sdr. SUYATNO dapatkan dari hasil hibah dan membeli dari pihak lain.

*Kelima*, berdasarkan bukti tertulis maupun bukti saksi, Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dalam buku C desa No. 678 adalah sebagian hibah dari orang lain kepada suami Tergugat I antara lain hibah dari KALERI dan MURSIH dan ada pula yang beli dari orang lain.

*Keenam*, berdasarkan bukti tertulis maupun bukti saksi, Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang sdr. SUPADI (Tergugat II) beli dari suaminya adalah tanah sawah milik suaminya sendiri, bukan termasuk tanah yang telah dihibahkan kepada Para Penggugat.

*Ketujuh*, berdasarkan bukti tertulis maupun bukti saksi, Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II secara sah telah membeli obyek-obyek tanah tersebut dari kakak kandungnya yang bernama SUYATNO, dan obyek-obyek tanah tersebut memang milik dari Sdr. SUYATNO hasil dari hibah dan membeli dari pihak lain.

*Kedelapan*, berdasarkan bukti tertulis maupun bukti saksi, Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah dalam buku C desa No. 678 tidak seluruhnya adalah milik dari ayahnya yang bernama almarhum MULYOWIDJOYO alias DERA alias ABDULRAHMAN, akan tetapi ada sebagian hibah dari orang lain kepada Sdr. SUYATNO antara lain hibah dari KALERI dan MURSIH dan ada pula yang Sdr. SUYATNO beli dari orang lain.

Dengan demikian setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Para Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat disitu terlihat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalanya sedangkan Penggugat dapat memberikan bukti baik secara tertulis berupa surat wasiat maupun keterangan dari saksi di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil kesimpulan oleh hakim bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa memang adalah hak milik pengkuat hal ini jelas tertulis dalam surat keterangan hibah/waris tertanggal 11 Juli 1991 dengan demikian terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Melawan

Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai dan kemudian menjual tanah-tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang merupakan bagian hak waris dari Para Penggugat, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat.

### **3.2. Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Pembagian Hak Waris Atas Tanah Yang Telah Dijual Oleh Salah Satu Ahli Waris**

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Pml bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yakni berkaitan dengan penguasaan hak berupa sebidang tanah yang dikuasi oleh tergugat hal ini diperkuat dengan bukti surat keterangan hibah/waris tertanggal 11 juli 1991 yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang dikuasi tergugat memanglah hak milik penggugat, maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1365 yaitu “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang membuat kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian sengketa terhadap pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

*Pertama*, Para Turut Tergugat dan Para Penggugat maupun Para Tergugat adalah keluarga besar alm Mulyowidjoyo alias Dera alias H. Abdulrahman;

*Kedua*, Alm. Mulyowidjoyo alias Dera alias H. Abdulrahman sudah menempatkan/menyerahkan untuk dinikmati anak-keturunan-nya tanah/ rumah/ lahan tanah darat/ tanah sawah menurut Blok, luas batas-batas yang telah ditunjukan sewaktu masih hidup bagianya Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat;

*Ketiga*, Yang masih jadi pokok sengketa adalah apakah objek sengketa adalah milik para Penggugat ataukah semula milik SUYATNO yang didapatkan

dari hasil hibah dan membeli dari KALERI dan MURSIH yang sekarang dikuasai Para Tergugat?

Berdasarkan bukti tertulis dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*Pertama*, Harta peninggalan pak H. Abdulrahman sudah dibagi-bagikan kepada anaknya termasuk kepada Suyanto dan Topo (para Penggugat).

*Kedua*, Tanah peninggalan dari pak H. Abdulrahman (objek sengketa) dikuasai oleh pak Suyatno (salah satu dari anaknya pak H. Abdulrahman) yaitu tanah bagiannya Suyanto dan Topo (para Tergugat) bagiannya dititipkan kepada pak Suyatno digarap sampai pak Suyatno meninggal dunia dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh istrinya pak Suyatno;

*Ketiga*, Telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang jelas jelas merugikan penggugat berupa penguasaan tanah yang merupakan hak milik penggugat

Untuk membuktikan dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa adalah milik para Tergugat yaitu semula milik SUYATNO yang didapatkan dari hasil hibah dan membeli dari KALERI dan MURSIH;

Dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat, yang pada pokoknya kesaksian para saksi tersebut tidak cukup mendukung pembuktian mengenai dalil objek sengketa adalah milik para Tergugat yaitu semula milik SUYATNO yang didapatkan dari hasil hibah dan membeli dari KALERI dan MURSIH;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil utama gugatannya yaitu bahwa almarhum Mulyowidjoyo alias Dera alias H. Abdulrahman selain meninggalkan 10 orang anak dan isteri/Hj Kasturi (Turut Tergugat VI) juga meninggalkan beberapa harta (berupa tanah-tanah) dan telah dibagi-bagikan (Juli 1991 telah menghibahkan/menyerahkan) kepada para ahli warisnya dan semuanya telah menerima hak bagiannya masing-masing kecuali Para Penggugat yang hak bagiannya (sebagai Tanah Obyek Sengketa) dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Sebidang Tanah Obyek Sengketa angka 2.1 tersebut persil No. III yang merupakan bagian dari, C.678 luas + 1.048,8 da. (10.488 M2) atau satu hektar lebih terletak di Desa Tlagasanao Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang dan Sebidang Tanah Objek Sengketa angka 2.2 tersebut dalam persil No. 37 yang merupakan bagian dari C. 576 luas + 885 da. (8850 MZ ) terletak di Blok Sered Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Adalah tanah-tanah milik Para Penggugat asal pemberian dari ayahnya yaitu alm Mulyowidjoyo alias Dera alias H.Abdulrahman, dengan ini dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Tuntutan agar dinyatakan bahwa jual beli tanah obyek sengketa 2.1 yang dilakukan oleh alm. Suyatno dan Yatun (Tergugat I) sebagai penjual dan Supadi (Tergugat II) sebagai pembeli adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat karena gugatan pokok telah dikabulkan, maka adalah beralasan hukum petitum ini dapat dikabulkan.

Tuntutan agar dinyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa baik angka 2.1 maupun angka 2.2 oleh Supadi (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Tuntutan agar pengadilan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Tuntutan agar pengadilan menetapkan Para Penggugat, Tergugat II dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris alm. Mulyowidjoyo alias Dera alias H. Abdulrahman serta menetapkan pula bahwa Tergugat I sebagai janda dan ahli waris dari alm Suyatno tidak relevan untuk dipertimbangkan karena yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ini tidak dapat dikabulkan.

Dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karena itu maka berkaitan dengan pembayaran biaya perkara yang timbul, oleh

karena para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka seluruhnya harus dibebankan kepada para Tergugat tersebut.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

*Pertama*, hakim dalam menentukan pembuktian atas sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Para Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Para Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil Kesimpulan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yaitu menguasai dan kemudian menjual tanah-tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang merupakan bagian hak waris dari Para Penggugat sehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat.

*Kedua*, hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Para Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum bahwa terbukti telah terjadi peristiwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana sesuai dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian biaya tersebut*".

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim memeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya berbunyi: (1) Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah-tanah milik Penggugat yang berasal pemberian dari ayahnya yaitu alm Mulyowidjoyo alias Dera alias H.

Abdulrahman; (3) Menyatakan bahwa jual beli tanah obyek sengketa 2.1 yang dilakukan oleh alm. Suyatno dan Yatun (Tergugat I) sebagai penjual dan Supadi (Tergugat II) sebagai pembeli adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat; (4) Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa baik angka 2.1 maupun angka 2.2 oleh Supadi (Tergugat II) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Para Penggugat; (5) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.

#### **4.2. Saran**

*Pertama*, untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan tuntutan hak atas harta warisan harus berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan benar. Karena dalam hal ini pada pemeriksaan pembuktian di persidangan harus bisa membuktikan bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Sehingga apabila Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan.

*Kedua*, untuk Tergugat apabila membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan maka harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, sehingga dalam pemeriksaan pembuktian dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya.

*Ketiga*, untuk Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan atas penyelesaian sengketa terhadap pembagian hak waris atas tanah yang telah dijual oleh salah satu ahli waris, diharapkan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak.

*Keempat*, untuk masyarakat secara umum diharapkan apabila dalam melakukan pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan/diwasiatkan oleh pewaris dengan ahli waris. Sehingga dalam pembagian tersebut masing-masing ahli waris mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan haknya dan terpenuhi rasa keadilan bagi sesama ahli waris.

## **PERSANTUNAN**

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya, kepada semuanya yang telah ada dan membantu penulis, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmunya dan semua pihak yang telah membantu penulis terima kasih banyak atas bantuannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadikusuma, Hilman, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, Angga, 2015, *Kedudukan Surat Perjanjian Terhadap Pembagian Harta Waris Wasiat Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Studi Putusan Nomor: 128/Pdt.G/2013/PN.YK (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.